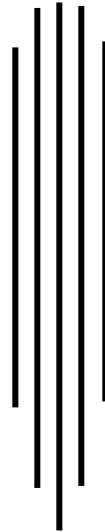




PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2014**



**PANGKALPINANG
2013**

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terbentuk sejak tahun 2000 berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 merupakan daerah otonom dengan tujuan dapat lebih leluasa untuk merencanakan berbagai sektor pembangunan serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Transportasi sebagai urat nadi kehidupan berbangsa dan bernegara, mempunyai fungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Transportasi merupakan suatu system yang terdiri dari sarana dan prasarana yang didukung oleh tata laksana dan sumber daya manusia membentuk jaringan prasarana dan jaringan pelayanan.

Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh peran sektor transportasi. Karenanya system transportasi harus dibina agar mampu menghasilkan jasa transportasi yang handal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan; mendukung mobilitas manusia, barang serta jasa; mendukung pola distribusi nasional serta mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan hubungan internasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara.

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka diperlukan perangkat daerah dalam membantu tugas Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mencapai visi dan misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017.

Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 55 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi khususnya di bidang Transportasi.

1.2. Maksud, Tujuan, Sasaran dan Fungsi

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 adalah menjabarkan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017 yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 yang rencana kerja, program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 adalah:

1. Menyediakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan untuk jangka 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2014.
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Fungsi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 adalah sebagai pedoman SKPD dalam rangka pelaksanaan pembangunan di tahun 2014.

1.3. Sistematika Penyusunan RENJA

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Menjelaskan latar belakang disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD);

1.2. MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Menguraikan maksud, tujuan, sasaran dan fungsi Renja SKPD;

1.3. SISTEMATIKAN PENYUSUNAN RKPD

Menguraikan isi dan bahasan tiap-tiap bab dalam Renja SKPD.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2011

2.1. VISI DAN MISI PEMERINTAH DAERAH

Menjelaskan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017;

- 2.2. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN TAHUN 2014
Menggambarkan isu strategis dalam melaksanakan pembangunan 1 (satu) tahun kedepan;
- 2.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2014
Menggambarkan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013.

BAB III VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 3.1. VISI DAN MISI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 – 2017
Menggambarkan Visi dan Misi Dinas Perhubungan Provinsi kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017;
- 3.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERHUBUNGAN
Menggambarkan Sasaran Yang Ingin Dicapai Dinas Perhubungan Provinsi kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017;
- 3.3. STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN
Menggambarkan Strategi Dinas Perhubungan Provinsi kepulauan Bangka Belitung;
- 3.4. KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN
Menggambarkan tentang Kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

BAB IV EVALUASI KINERJA

Menggambarkan Evaluasi Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

BAB V RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2014

- 5.1. MATRIKS RENJA SKPD DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2014
Menggambarkan Renja SKPD DINAS PERHUBUNGAN Tahun 2014

BAB VI PENUTUP

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG TAHUN 2014

2.1 Visi dan Misi Pemerintah Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 merupakan rencana kerja tahun kedua dari RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017 dengan Visinya adalah *Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang aman, damai, sejahtera, adil, demokratis dan berdaya saing global dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

2.2. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN TAHUN 2014

2.2.1. Isu Strategis Wilayah Sumatera Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 terkait Transportasi

Beberapa isu strategis wilayah Sumatera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 terkait Transportasi adalah sebagai berikut :

1. Integrasi jaringan transportasi intermoda wilayah

Keragaman potensi sumber daya alam yang dimiliki provinsi-provinsi di wilayah Sumatera berpotensi untuk meningkatkan perdagangan domestik dan menghasilkan sinergi pengembangan industri unggulan wilayah. Untuk itu, dukungan jaringan transportasi wilayah menjadi sangat strategis. Kondisi saat ini menunjukkan belum optimalnya kapasitas jaringan jalan lintas Sumatera serta belum berkembangnya integrasi jaringan transportasi jalan, kereta api, angkutan sungai, laut, dan udara.

2.2.2 Isu Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pada Tahun 2014

Berdasarkan evaluasi pembangunan tahun 2012 dan tahun 2013 juga memperhatikan fakta permasalahan dan tantangan pada tahun 2014, maka ditetapkan isu strategis yang akan dihadapi pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Infrastruktur Wilayah Sampai ke Pelosok Daerah

Permasalahan yang dihadapi antara lain masih kurangnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah terutama ke pelosok daerah, rendahnya pelayanan infrastruktur wilayah, perlunya pengembangan infrastruktur strategis yang direncanakan pada tahap sebelumnya, pelabuhan laut, penanganan jalan dan peningkatan status jalan dan pengembangan system transportasi dalam mendukung aksesibilitas antar wilayah, rehabilitasi daerah irigasi strategis, optimalisasi penyediaan air baku, system pengelolaan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas ketersediaan air bersih untuk menunjang kegiatan rumah tangga dan pertanian.

2. Pembangunan Sektoral yang berorientasi pada Pembangunan Spatial (Penataan Ruang dan Wilayah)

Permasalahan yang dihadapi dalam optimalisasi pemanfaatan ruang untuk investasi antara lain : belum optimalnya pengembangan objek strategis yang memiliki peluang investasi, seperti : Pembangunan bandara, pelabuhan laut, pengairan, angkutan massal, serta pengembangan energi, pariwisata, agribisnis, bisnis kelautan, dan industri; masih adanya konflik pemanfaatan ruang terkait dengan kebutuhan ruang untuk investasi terhadap penetapan 45% kawasan lindung.

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kepentingan ekonomi diwujudkan dalam pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK) dan dalam pelaksanaannya diharapkan pembangunan sektoral akan selalu berorientasi pada pembangunan spatial dan penataan ruang dan wilayah.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

3.1 VISI DAN MISI SKPD DINAS PERHUBUNGAN

Visi SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 -2017 adalah ***“Terwujudnya Transportasi Terpadu yang aman, nyaman, dan terjangkau sebagai pendorong utama pembangunan ekonomi, sosial, politik dan budaya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”***

Misi SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017 adalah :

- 3.1.1. Memenuhi dan Meningkatkan Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi;
- 3.1.2. Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang sarana dan prasarana serta SDM
- 3.1.3. Transportasi;
Mendorong aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi;
- 3.1.4. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi yang handal dan memberikan nilai tambah;
- 3.1.5. Meningkatkan kualitas SDM yang professional dan proporsional melalui diklat teknis operasional dan penjenjangan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

SKPD Dinas Perhubungan berupaya meningkatkan pelayanan transportasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien.

Penyelenggaraan kegiatan transportasi yang efektif berkaitan dengan ketersediaan aksesibilitas, optimalisasi kapasitas, maksimalisasi kualitas serta keterjangkauan dalam pelayanan.

Penyelenggaraan Transportasi yang efisien berkaitan dengan kemampuan pengembangan dan penerapan teknologi transportasi yang berdampak pada maksimalisasi daya guna dan minimalisasi biaya yang menjadi beban masyarakat.

Pertumbuhan sektor transportasi diupayakan mendukung

pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional, perluasan lapangan kerja, menjamin kepastian dan stabilitas penyediaan jasa transportasi di daerah terpencil, pemerataan pelayanan jasa transportasi di seluruh wilayah Bangka Belitung dan terwujudnya Tataran Transportasi Wilayah yang memaksimalkan Rencana Tata Ruang Wilayah serta ramah lingkungan.

Sasaran pembangunan sektor transportasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain :

- 3.2.1. Terwujudnya pertumbuhan sektor transportasi dalam rangka mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional serta perluasan lapangan kerja;
- 3.2.2. Terjaminnya kepastian dan stabilitas penyediaan jasa transportasi di seluruh wilayah Kepulauan Bangka Belitung untuk meningkatkan kelancaran distribusi barang, jasa dan mobilitas masyarakat;
- 3.2.3. Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pelayanan jasa transportasi ke seluruh wilayah Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pemerataan pembangunan Nasional.
- 3.2.4. Terwujudnya pembangunan prasarana dan fasilitas transportasi yang memaksimalkan pemanfaatan Perencanaan Tata Ruang Wilayah serta terciptanya Tataran Transportasi Wilayah yang berkualitas dan ramah lingkungan

3.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

3.3.1 STRATEGI SKPD DINAS PERHUBUNGAN

Dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi, serta mencapai tujuan dan sasaran seperti yang telah disebutkan di atas SKPD Dinas Perhubungan melaksanakan pembangunan transportasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan 7

(Tujuh) Pilar strategi antara lain :

- 3.3.1.1 Pembangunan transportasi dilakukan berdasarkan prinsip ekonomi dalam rangka memaksimalkan manfaat dan meminimumkan biaya sehingga menghasilkan pengembalian biaya baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang;
- 3.3.1.2 Pembangunan transportasi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek politik, sosial budaya dan pertahanan wilayah sehingga hasil pembangunan sektor perhubungan memiliki daya guna tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat;
- 3.3.1.3 Pembangunan transportasi difokuskan kepada segmen-segmen tertentu dalam rangka menunjang kegiatan sektor-sektor lain yang memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan daerah;
- 3.3.1.4 Pembangunan transportasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, keadilan, kepastian hukum dan kelestarian lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan;
- 3.3.1.5 Pembangunan transportasi dilakukan dengan orientasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- 3.3.1.6 Pembangunan transportasi dilakukan sesuai dengan arah pengembangan sosial dan ekonomi yang diadopsi dalam perencanaan makro nasional, perencanaan sektoral, perencanaan daerah dan penganggaran secara realistic dan rasional;
- 3.3.1.7 Pembangunan transportasi dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan dan pengawasan baik pada

skala kecil, menengah maupun besar.

Sebagai implementasi 7 (Tujuh) Strategi di atas, SKPD Dinas Perhubungan menerapkan Pola Dasar Penyelenggaraan Perhubungan melalui Program 6 (Enam) P yaitu :

- a. Pengembangan dan Pembangunan
Melakukan kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Transportasi Darat, Laut dan Udara;
- b. Pengelolaan dan Pemeliharaan
Mengelola UPT sebagai asset desentralisasi dan dekonsentrasi serta memelihara fasilitas yang sudah ada;
- c. Pembinaan dan Pengawasan
Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggara dan stake holder transportasi serta masyarakat pengguna jasa transportasi.

3.3.2 KEBIJAKAN SKPD DINAS PERHUBUNGAN

Kebijakan SKPD Dinas Perhubungan dalam melaksanakan pembangunan transportasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain :

- 3.3.2.1 Ketahanan Nasional dan Wawasan Nusantara;
 - . Mengembangkan system transportasi di Kepulauan Bangka Belitung dengan memperhitungkan aspek geografis, sumberdaya manusia, potensi sumber daya alam, aspek ekonomi, sosial budaya dan aspek pertahanan wilayah;
- 3.3.1.2 Pertumbuhan dan Effisiensi Daerah;
 - . Menyediakan transportasi yang berkualitas guna meningkatkan pertumbuhan dan efisiensi daerah dengan memperhitungkan asas pemerataan dan stabilitas pelayanan jasa transportasi sampai ke pelosok daerah Kepulauan Bangka Belitung;

- 3.3.2.3 Koordinasi Inter, Antar Sektor dan Antar Moda;
- . Meningkatkan koordinasi antar sektor, sub sektor transportasi atau antar moda transportasi dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang terpadu guna menunjang pembangunan daerah dan pembangunan Nasional;
- 3.3.2.4 Rencana Terpadu dan Pengembangan Teknologi;
- . Melaksanakan pembangunan transportasi di Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan perencanaan yang terpadu dengan memanfaatkan pengembangan teknologi dalam rangka mewujudkan keterpaduan antara sarana, prasarana, kebutuhan tenaga, keahlian dan teknologi;
- 3.3.2.5 Persyaratan Teknis, Keselamatan dan Keamanan;
- . Mengawasi penyelenggaraan Transportasi di Kepulauan Bangka Belitung sehingga sesuai dengan persyaratan teknis, keselamatan, keamanan dan tata tertib lalu lintas yang telah ditetapkan;
- 3.3.2.6 Fungsi Penunjang dan Fungsi Pendorong;
- . Melaksanakan kebijakan pelayanan transportasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan mengikutsertakan masyarakat dalam rangka mengupayakan program pelayanan transportasi perintis sebagai pendorong pembangunan daerah;
- 3.3.2.7 Dukungan terhadap sektor-sektor lain;
- . Kebijakan pembangunan transportasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan dapat mendukung kelancaran imobilitas, distribusi dan pembangunan terutama pada sektor-sektor yang berbasis sumber daya alam yang strategis dalam upaya menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi;
- 3.3.2.8 Pembangunan Transportasi Berkelanjutan;
- . Pembangunan Transportasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan secara berkelanjutan dengan

pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan, hemat energy, serta meningkatkan kinerja keselamatan dan pelayanan;

3.3.2.9 Melibatkan Peran Serta Masyarakat (Sektor Swasta);

. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diupayakan melibatkan peran serta masyarakat (swasta) dan diarahkan sesuai bidang yang dibutuhkan oleh masyarakat;

3.3.2.1 Kemudahan Angkutan Massal;

0 Memberikan kemudahan-kemudahan dalam penyelenggaraan angkutan massal yang melayani jaringan transportasi utama di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB IV
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012

Pada tahun 2012, Dinas Perhubungan melaksanakan urusan wajib. Dibawah ini diuraikan secara terperinci urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012.

4.1. URUSAN WAJIB

4.1.1. Urusan Wajib Perhubungan

Urusan Wajib Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2012, anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka di APBD Induk sebesar Rp. 18.948.734.858,90, dengan Komposisi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.245.269.858,90 sedangkan Belanja Langsung Rp. 13.703.465.000,00. Pada APBD Perubahan tahun 2012, Anggaran Dinas Perhubungan menjadi Rp. 19.313.042.034,44 (Mengalami Penambahan sebesar Rp. 364.307.175,54) dengan Komposisi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.465.127.034,44 sedangkan Belanja Langsung Rp. 14.847.915.000,00. Pada Tahun 2012 urusan Perhubungan dilaksanakan melalui 8 (delapan) program dan 44 (empat puluh empat) kegiatan. Dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 19.313.042.034,44 Realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 17.185.624.130,00 atau 88,98%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 2.127.417.904,44 (11,02%).

Tabel 4.1.1.1
Realisasi Belanja Tidak Langsung Dinas Perhubungan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012

NO	URAIAN KEGIATAN	APBD	APBD Perubahan (Rp)	FISI K (%)	REALISASI		SISA ANGGARAN	
					KEUANGAN (Rp)	%	(Rp)	%
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.245.269.858,90	4.465.127.034,44	100,00	3.525.008.137,00	78,94	940.118.897,44	21,06
A	GAJI DAN TUNJANGAN	3.381.849.858,90	2.524.157.034,44	100,00	2.164.592.062,00	64,	1.217.257.	36,0

						00	796,90	0
B	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	1.863.420 .000,00	1.940.910 .000,00	100, 00	1.360.41 6.075,00	73, 00	503.003.9 25,00	27,0 0

**Tabel 4.1.1.2
Realisasi Belanja Langsung Dinas Perhubungan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2012**

N O	URAIAN KEGIATAN	APBD	APBD Perubahan (Rp)	FISI K (%)	REALISASI		SISA ANGGARAN	
					KEUANGA N (Rp)	%	(Rp)	%
II	BELANJA LANGSUNG	13.703.465. 000,00	14.847. 915.000 ,00	100 ,00	13.660.61 5.993,00	92, 01	1.187.299. 007,00	7,99
A	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.225.300.0 00,00	1.225.3 00.000, 00	100 ,00	1.159.725. 793,00	95, 32	65.576.20 7,00	4,68
1	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	20.000.000, 00	20.000. 000,00	100, 00	19.794.500 ,00	98,9 7	205.500,00	1,03
2	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI , SUMBER DAYA DAN LISTRIK	150.000.000 ,00	150.000 .000,00	100, 00	104.378.04 3,00	69,5 8	45.621.957 ,00	30,4 2
3	PENYEDIA JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	40.800.000, 00	40.800. 000,00	100, 00	36.600.000 ,00	89,7 0	4.200.000, 00	10,3 0
4	PENYEDIA	187.500.000	187.500	100,		99,9	12.500,00	

	JASA KEBERSIHA N KANTOR	,00	.000,00	00	187.487.50 0,00	9		0,01
5	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN DAN PERALATAN KERJA	90.000.000, 00	90.000. 000,00	100, 00	89.993.000 ,00	99,9 9	7.000,00	0,01
6	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	85.000.000, 00	85.000. 000,00	100, 00	84.999.200 ,00	99,9 9	2.800,00	0,01
7	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDA AN	80.000.000, 00	80.000. 000,00	100, 00	79.982.750 ,00	99,9 7	17.250,00	0,03
8	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN	12.000.000, 00	12.000. 000,00	100, 00	11.800.000 ,00	98,3 3	200.000,00	1,67
9	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	60.000.000, 00	60.000. 000,00	100, 00	59.875.000 ,00	99,7 9	125.000,00	0,21
10	RAPAT- RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH	500.000.000 ,00	500.000 .000,00	100, 00	484.815.80 0,00	96,9 6	15.184.200 ,00	3,04
B	PROGRAM PENINGKAT AN SARANA DAN	690.180.00 0,00	1.431.4 75.000, 00	100 ,00	1.394.759. 900,00	97, 43	36.715.10 0,00	2,57

	PRASARANA APARATUR							
1 1	PENGADAAA N KENDARAAN DINAS/OPER ASIONAL	0,00	103.765 .000,00	100, 00	102.377.00 0,00	98,6 6	1.388.000, 00	1,34
1 2	PENGADAAA N PERLENGKA PAN GEDUNG KANTOR	98.000.000, 00	98.000. 000,00	100, 00	92.675.000 ,00	94,5 6	5.325.000, 00	5,44
1 3	PENGADAAA N PERALATAN GEDUNG KANTOR	107.000.000 ,00	107.000 .000,00	100, 00	106.065.50 0,00	99,1 2	934.500,00	0,88
1 4	PENGADAAN MEUBELAIR	0,00	106.765 .000,00	100, 00	106.164.50 0,00	99,4 3	600.500,00	0,57
1 5	PEMELIHAR AAN RUTIN/BERK ALA KENDARAAN DINAS/OPER ASIONAL	195.180.000 ,00	195.180 .000,00	100, 00	174.741.00 0,00	89,5 2	20.439.000 ,00	11,4 8
1 6	PENGADAAN PARTISI GEDUNG KANTOR	107.000.000 ,00	107.000 .000,00	100, 00	105.499.40 0,00	98,5 9	1.500.600, 00	1,40
1 7	REHABILITA SI TAMAN KANTOR DINAS PERHUBUNG AN	84.000.000, 00	84.000. 000,00	100, 00	82.355.000 ,00	98,0 4	1.645.000, 00	1,96

18	REHABILITASI HALAMAN PARKIR KANTOR DINAS PERHUBUNGAN	99.000.000,00	99.000.000,00	100,00	97.377.000,00	98,36	1.623.000,00	1,64
19	PENGADAAN RADIO KOMUNIKASI DAN PERLENGKAPANNYA	0,00	104.000.000,00	100,00	104.000.000,00	100,00	0,00	0,00
20	REHABILITASI SEDANG/BERAT LANTAI KANTOR PERHUBUNGAN	0,00	115.000.000,00	100,00	113.995.500,00	99,12	1.004.500,00	0,88
21	REHABILITASI SEDANG/BERAT PAGAR KANTOR PERHUBUNGAN	0,00	105.000.000,00	100,00	105.000.000,00	100,00	0,00	0,00
22	PENGADAAN PINTU PENGAMAN KANTOR PERHUBUNGAN	0,00	103.000.000,00	100,00	102.285.000,00	99,30	715.000,00	0,70
23	PENGADAAN AC PADA KANTOR DINAS PERHUBUNGAN	0,00	103.765.000,00	100,00	102.225.000,00	98,51	1.540.000,00	1,49

C	PROGRAM PENINGKAT AN DISIPLIN APARATUR	91.055.000, 00	166.110 .000,00	100 ,00	162.730.8 50,00	97, 96	3.379.150, 00	2,04
2 4	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKA PANNYA	91.055.000, 00	120.555 .000,00	100, 00	117.236.60 0,00	97,2 4	3.318.400, 00	2,76
2 5	PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	0,00	45.555. 000,00	100, 00	45.494.250 ,00	99,8 6	60,750,00	0,14
D	PROGRAM PEMBANGUN AN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNG AN	1.211.950.0 00,00	1.211.9 50.000, 00	100 ,00	1.147.511. 000,00	94, 68	64.439.00 0,00	5,31
2 6	KOORDINASI DALAM PEMBANGUN AN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNG AN	73.050.000, 00	73.050. 000,00	100, 00	71.449.000 ,00	97,8 0	1.601.000, 00	2,20
2 7	MONITORIN G, EVALUASI DAN KOORDINASI BIDANG TRANSPORT ASI	72.000.000, 00	72.000. 000,00	100, 00	66.241.000 ,00	92,0 0	5.759.000, 00	8,00

28	PENYUSUNAN SINKRONISASI STUDY TRANSPORTASI BANGKA BELITUNG DENGAN TATRANAS	266.900.000,00	266.900.000,00	100,00	258.437.500,00	96,82	8.462.500,00	3,18
29	PENYUSUNAN DEDAHAMAN PARKIR BANDARA DEPATI AMIR PANGKALPINANG	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00	751.383.500,00	93,92	48.616.500,00	6,08
E	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	49.980.000,00	49.980.000,00	100,00	46.130.000,00	92,29	3.850.000,00	7,71
30	PEMELIHARAAN ALAT KESELAMATAN TRANSPORTASI	49.980.000,00	49.980.000,00	100,00	46.130.000,00	92,29	3.850.000,00	7,71
F	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	645.000,00	923.100,00	100,00	907.513,300,00	98,31	15.586,700,00	1,69

31	KEGIATAN PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM DI JALAN RAYA	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	49.862.000,00	99,72	138.000,00	0,28
32	SOSIALISASI /PENYULUHAN KETERTIBAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	73.122.500,00	97,49	1.877.500,00	2,51
33	KEGIATAN PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SOPIR/JURUMUDI/AWAK KENDARAAN ANGKUTAN UMUM TELADAN	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	117.012.800,00	97,51	2.987.200,00	2,49
34	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ANGKUTAN LEBARAN	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	49.402.000,00	98,80	598.000,00	1,20
35	PENYELENGGARAAN PEMILIHAN PELAJAR TELADAN KESELAMAT	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	49.920.000,00	99,84	80.000,00	0,16

	AN LALU LINTAS							
3 6	PENYELENG GARAAN LOMBA LALU LINTAS (WAHANA TATA NUGRAHA)	300.000.000 ,00	300.000 .000,00	100, 00	296.418.50 0,00	98,8 0	3.581.500, 00	1,20
3 7	PERSIAPAN OPERASIONA L TANJUNG BATU	0,00	205.300 .000,00	100, 00	202.260.50 0,00	98,5 1	3.039.500, 00	1,49
3 8	KEGIATAN EVALUASI DAN PENGAWASA N KEPELABUH ANAN DI WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0,00	72.800. 000,00	100, 00	69.515.000 ,00	95,4 8	3.285.000, 00	4,52
G ·	PROGRAM PEMBANGUN AN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNG AN	6.500.000.0 00,00	6.500.0 00.000, 00	100 ,00	5.709.660. 300,00	87, 84	840.339.7 00,00	12,16
3 9	PENGADAAN RAMBU SUAR DARAT KURAU	500.000.000 ,00	500.000 .000,00	100, 00	394.434.80 0,00	78,8 8	105.565.20 0,00	21,12
4 0	PEKERJAAN TANAH DI BANDARA DEPATI AMIR	6.500.000.0 00,00	6.500.0 00.000, 00	100, 00	5.315.225. 500,00	87,8 5	734.774.50 0,00	12,15

H .	PROGRAM PENGENDAL IAN DAN PENGAMANA N LALU LINTAS	3.290.000.0 00,00	3.290.0 00.000, 00	100 ,00	3.132.584. 850,00	95, 22	157.415.1 50,00	4,78
4 1	PENGADAAN DAN PEMASANGA N RAMBU- RAMBU LALU LINTAS	1.350.000.0 00,00	1.350.0 00.000, 00	100, 00	1.318.912. 000,00	97,6 9	31.088.000 ,00	2,31
4 2	PENGADAAN DAN PEMASANGA N PAGAR PENGAMAN JALAN	890.000.000 ,00	890.000 .000,00	100, 00	798.959.85 0,00	89,7 7	91.040.150 ,00	10,2 3
4 3	PENGADAAN DAN PEMASANGA N ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS SIMPANG EMPAT JALAN ALEXANDER PANGKALPIN ANG	350.000.000 ,00	350.000 .000,00	100, 00	332.244.00 0,00	94,9 2	17.756.000 ,00	5,08
4 4	PEMBANGUN AN MARKA JALAN DI TANJUNGP ANDAN (DESA KACANG BUTOR) KELAPA –	700.000.000 ,00	700.000 .000,00	100, 00	682.469.00 0,00	97,4 9	3.904.000, 00	2,51

KAMPIT – MANGGAR							
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.245.269.8 58,90	4.465.1 27.034, 44	100 ,00	3.525.008. 137,00	78, 94	940.118.8 97,44	21,0 6
JUMLAH BELANJA LANGSUNG	13.703.465. 000,00	14.847. 915.000 ,00	100 ,00	13.660.61 5.993,00	92, 01	1.187.299. 007,00	7,99
JUMLAH BELANJA	18.948.734. 858,90	19.313. 042.034 ,44	100 ,00	17.185.62 4.130,00	88, 98	2.127.417. 904,44	11,0 2

4.1.2 Kepegawaian

Urusan Wajib Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan 7 program dengan 24 kegiatan didukung sebanyak 58 pegawai (data sampai dengan Desember 2012), dengan status kepegawaian 58 CPNS, 0 orang tenaga honorer. Kualifikasi pendidikan pegawai terdiri dari S2 sebanyak 6 orang, S1 sebanyak 23 orang, DIV Sebanyak 5 Orang, DIII Sebanyak 7 orang, DII Sebanyak 2 Orang, SMU Sebanyak 17 Orang. Berdasarkan eselonering yang menduduki jabatan eselon II sebanyak 1 orang, eselon III sebanyak 2 orang dan eselon IV sebanyak 12 orang.

Tabel 4.1.2.3
Klasifikasi Pegawai di Dinas Perhubungan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Doktoral/ S3	-	-	-
2	Pasca Sarjana/ S2	9	5	14
3	Sarjana / S1	10	5	15
4	Diploma-IV	5	-	5
5	Diploma-III	6	1	7
6	Diploma-II	1	1	2

7	SMU	-	15	15
8	SLTP	-	-	-
9	SD	-	-	-
JUMLAH		33	25	58

Tabel 4.1.2.4
Klasifikasi Pegawai di Dinas Perhubungan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	II A	1	-	1
2	II B	11	1	2
3	II C	6	1	3
4	II D	-	-	4
3	III A	11	8	3
4	III B	2	1	4
5	III C	10	2	5
6	III D	1	-	6
5	IV A	1	-	5
6	IV B	1	-	6
7	IV C	1	-	7
8	Fungsional	-	-	8
JUMLAH		45	13	58

Tabel 4.1.2.5
Peta Jabatan di Dinas Perhubungan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Golongan

No	Eselonering	Jabatan		Jumlah
		Terisi	Kosong	
1	Eselon II	1	1
2	Eselon III	4	4
3	Eselon IV	10	2	12
8	Fungsional
Jumlah		15	2	17

4.1.3 Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2013 dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- Kurangnya fasilitas dan sarana koordinasi antar instansi terkait

sehingga sinkronisasi program antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota belum optimal

- Belum maksimalnya pencapaian target kinerja mengingat keterbatasan dalam alokasi dana untuk pelaksanaan program yang direncanakan
- Tidak tersedia alokasi dana untuk peningkatan kualitas SDM terutama kemampuan teknis perhubungan.

Untuk menanggulangi kendala dan masalah tersebut di atas telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Melaksanakan Rapat Koordinasi bidang Perhubungan dengan Kabupaten / Kota setiap tahun guna sinkronisasi Program Pembangunan.
- Mengupayakan percepatan pencapaian target kinerja melalui pembangunan sektor prioritas.
- Mengajukan usulan program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kemampuan teknis perhubungan bagi para pegawai.

B A B V
RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG TAHUN 2014

5.1. MATRIKS RENJA SKPD DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2014

Di dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan SKPD DINAS PERHUBUNGAN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014, penyusunan dokumen perencanaan tahun SKPD tersebut telah melalui tahapan – tahapan, yaitu:

1. Telah disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017.
2. Telah dijabarkannya RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017 ke dalam Rencana Strategis DINAS PERHUBUNGAN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017.
3. Telah disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 21 Tahun 2010.

Di bawah ini tabel Rencana Kerja SKPD DINAS PERHUBUNGAN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan dilaksanakan pada tahun 2014.

**REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM**Formulir
RKA-SKPD
2,2,1**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Tahun Anggaran 2014**Urusan Pemerintahan : 1.07.- PERHUBUNGAN
Organisasi : 1.07.01.- DINAS PERHUBUNGAN

Kode		Uraian	Lokasi kegiatan	Belanja			Jumlah
Program	Kegiatan			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
(1.07.) - PERHUBUNGAN							
01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				2.096.000.000
	0100	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			30.000.000		30.000.000
	0200	Penyediaan jasa komunikasi,Sumber daya air dan Listrik			270.000.000		270.000.000
	0700	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan		48.000.000			48.000.000
	0800	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		193.050.000	71.950.000		265.000.000
	0900	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			165.000.000		165.000.000
	1000	Penyediaan Alat tulis Kantor			175.000.000		175.000.000
	1100	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			175.000.000		175.000.000

	1300	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		5.150.000	4.850.000	198.000.000	208.000.000
	1500	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan			8.400.000	6.600.000	15.000.000
	1700	Penyediaan makanan dan minuman			145.000.000		145.000.000
	1800	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			600.000.000		600.000.000
02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					1.167.320.000
	2400	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		52.650.000	280.670.000		333.320.000
	0500	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		9.900.000	3.100.000	405.000.000	418.000.000
	1000	Pengadaan Meubelair		5.000.000	5.000.000	198.000.000	208.000.000
	1100	Pengadaan Partisi Gedung Kantor		5.000.000	5.000.000	198.000.000	208.000.000
03		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur					180.000.000
	0100	Pendidikan dan Pelatihan Formal		4.200.000	175.800.000		180.000.000
15		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan					550.000.000
	0300	Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		50.950.000	149.050.000		200.000.000
	0800	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			100.000.000		100.000.000

	0900	Forum koordinasi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan jalan		31.700.000	218.300.000		250.000.000
16		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ					3.650.000.000
	0300	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jembatan Timbang	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	18.300.000	146.700.000	3.335.000.000	3.500.000.000
	0500	Pemeliharaan Alat Keselamatan Transportasi		7.100.000	142.900.000		150.000.000
17		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan					1.400.000.000
	0500	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di jalan raya	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	69.625.000	130.375.000		200.000.000
	1100	Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Angkutan		69.625.000	105.375.000		175.000.000
	1400	Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan		35.425.000	99.575.000		135.000.000
	1500	Kegiatan Pemilihan dan Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan		57.225.000	92.775.000		150.000.000
	1800	Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Lebaran		28.250.000	91.750.000		120.000.000
	1900	Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Natal dan Tahun Baru		28.250.000	91.750.000		120.000.000
	2000	Penyelenggaraan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		20.950.000	129.050.000		150.000.000
	2100	Penyelenggaraan Lomba Lalu Lintas (WAHANA TATA NUGRAHA)		156.750.000	193.250.000		350.000.000
18		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan					204.000.000.000

	0400	Pembangunan Dermaga di Pulau Seliu	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	28.350.000	241.650.000	6.730.000.000	7.000.000.000
	0500	Pembangunan Dermaga di Pulau Lepar Kabupaten Bangka Selatan		28.350.000	241.650.000	6.730.000.000	7.000.000.000
	0600	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Navigasi di Pulau-pulau berpenduduk		22.500.000	98.450.000	2.879.050.000	3.000.000.000
	0700	Pembangunan Dermaga di Pulau Bukulimau		28.350.000	241.650.000	6.730.000.000	7.000.000.000
	0800	Pembangunan Masjid Bandara Depati Amir Pangkalpinang		33.600.000	966.400.000	24.000.000.000	25.000.000.000
	0900	Pembangunan Tahap I Pelabuhan Pangkalbalam		44.100.000	1.343.650.000	48.612.250.000	50.000.000.000
	1000	Pekerjaan Konstruksi Tahap I Halaman Parkir Bandara Depati Amir Pangkalpinang		52.500.000	3.525.500.000	101.422.000.000	105.000.000.000
19		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas					4.885.000.000
	0400	Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Pulau BelitungProvinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	29.550.000	150.450.000	2.320.000.000	2.500.000.000
	0500	Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Pulau Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		33.600.000	31.400.000	2.320.000.000	2.385.000.000
JUMLAH				1.198.000.000	10.646.420.000	206.083.900.000	217.928.320.000

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) DINAS PERHUBUNGAN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD DINAS PERHUBUNGAN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimana penyusunan dokumen tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Tahunan SKPD.

Dengan adanya Rencana Kerja SKPD DINAS PERHUBUNGAN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014, penetapan program dan kegiatan yang dimaksud didasarkan atas prioritas pembangunan sebagai bentuk penjabaran visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan provinsi akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.